



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LKIP-2022



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 telah selesai disusun.

Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku merupakan komitmen dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 jo. Keputusan Kepala LAN RI No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah kepada masyarakat, LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku bertujuan untuk menyampaikan perkembangan atas capaian sasaran dan target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku secara berkala selama kurun waktu satu tahun. Selain itu LKIP juga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.

LKIP merupakan implementasi RENSTRA BKD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dan wujud pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dalam menindaklanjuti Visi dan Misi Gubernur Maluku Dengan Wakil Gubernur Maluku dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu Mewujudkan Layanan Kepegawaian yang Profesional dan Inovatif serta Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara.

Akhirnya kami berharap melalui penyusunan LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 ini dapat menjadi media untuk mengevaluasi kinerja BKD selama satu tahun terakhir agar dapat meningkatkan kinerja aparatur yang berdampak kepada kinerja OPD sehingga lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasannya.

Ambon, Januari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI MALUKU**



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku	3
1.2.1 Susunan Organisasi	4
1.3 Isu Strategis BKD Provinsi Maluku Tahun 2022	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022	12
2.1.1 Rencana Strategis dan Target Tahun 2022	12
2.1.2 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
2.2 Perjanjian Kinerja 2022	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.1.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2022	20
3.2 Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022	29
BAB IV PENUTUP	32
4.1 Tinjauan Umum	32
4.2 Masalah Yang Dihadapi	33
4.3 Saran dan Tindak Lanjut	33

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		Halaman
1.1	Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku	4
1.2	Jumlah ASN BKD Berdasarkan Jabatan	9
1.3	Komposisi ASN BKD Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10

DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
2.1	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
3.2	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian kepada ASN	21
3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2022	22
3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2021 Dan Tahun 2022	22
3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2021, Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2024	23
3.6	Capaian Kinerja Program/Kegiatan penunjang Pelayanan BKD Provinsi Maluku Tahun 2022	27
3.7	Realisasi Anggaran BKD Provinsi Maluku Tahun 2022 31 Desember 2022	29

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Salah satu upaya untuk perbaikan pelayanan publik yaitu Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah dan menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Semua harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sebagai Lembaga Teknis Daerah berbentuk badan yang merupakan unsur yang menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif sekaligus menyusun konsep-konsep, gagasan-gagasan serta terobosan di bidang kepegawaian sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan harus mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian mulai dari pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai secara optimal dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak sistem organisasi pemerintahan Provinsi Maluku dalam mewujudkan visi :

“MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI, TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS GUGUSAN KEPULAUAN”

Pengelolaan pegawai yang optimal dikuantifikasikan ke dalam indikator-indikator yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan kedalam Renstra dan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.

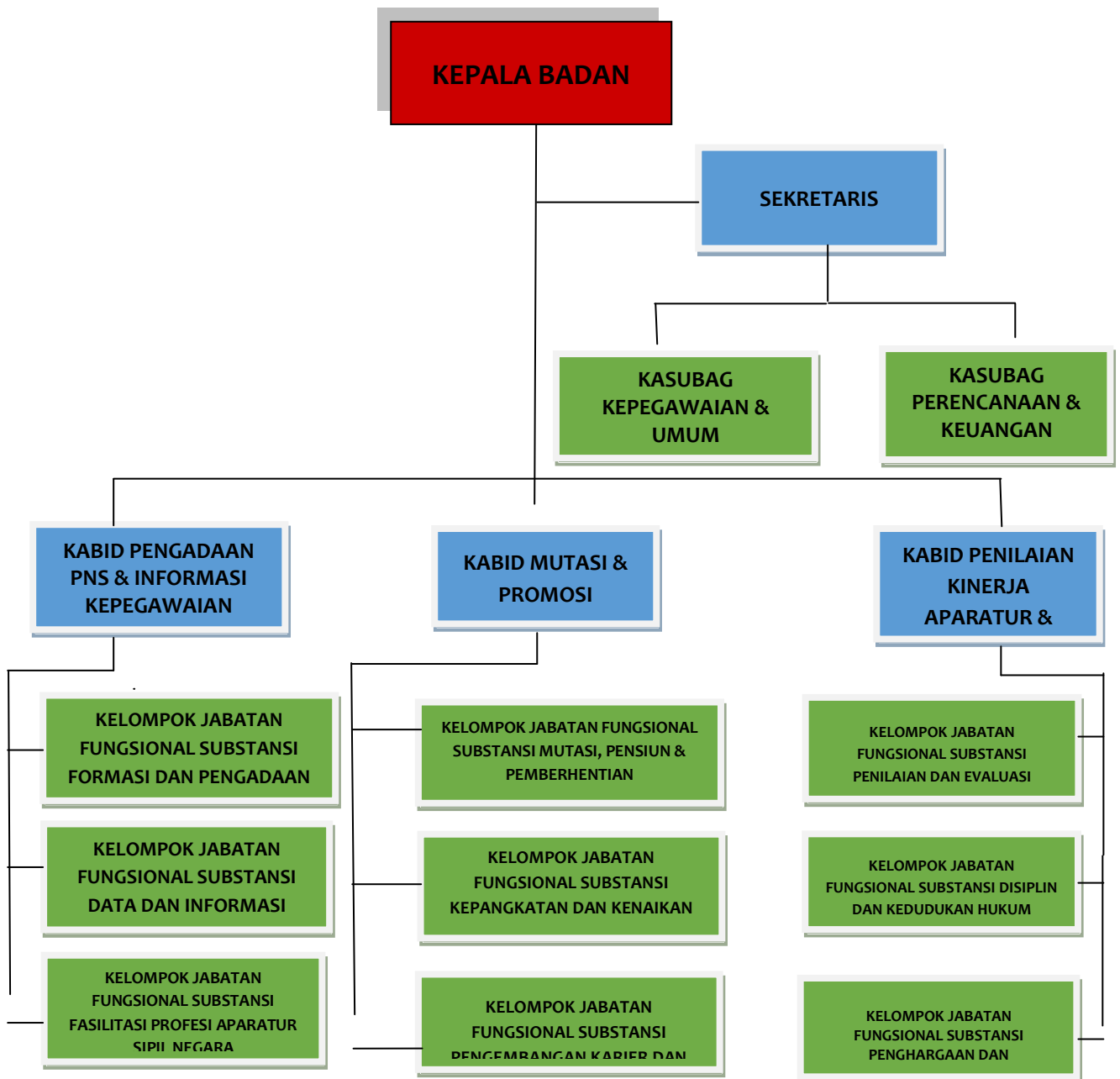
Salah satu konsekuensi logis dari kondisi dan posisi tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku harus mampu meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan baik dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan pegawai maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama dalam menghadapi era persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam upaya mengembalikan *trust* (kepercayaan) masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, jujur dan transparan.

Secara garis besar program-program kegiatan diarahkan kepada :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara
2. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai ASN
3. Meningkatnya pelayanan dan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
4. Tersedianya akurasi data dan optimalisasi pengelolaan tata naskah kepegawaian
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD melalui penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis sesuai struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sebagai berikut

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU



Sumber : Pergub Maluku 101 Tahun 2021

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Tugas dan Fungsi

2.1.1.1 Kepala BKD Provinsi Maluku

Kepala BKD Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian daerah Provinsi Maluku sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian.

2.1.1.2 Sekretariat

Sekretaris BKD Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan.

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2.1.1.3 Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian

Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian pada BKD Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun kebutuhan ASN, pengadaan ASN, informasi kepegawaian, fasilitasi profesi ASN dan penataan arsip pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Formasi dan Pengadaan, mempunyai tugas menyusun formasi pegawai ASN, dan melaksanakan pengadaan ASN sesuai dengan prosedur dan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Data dan Informasi Kepegawaian, mempunyai tugas menyusun dan merencanakan rencana kegiatan pengembangan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian serta menyusun data, informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana fasilitasi kelembagaan profesi ASN, fasilitas pengelolaan administrasi, kepegawaian dan kegiatan organisasian serta menata arsip pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

2.1.1.4 Bidang Mutasi dan Promosi Bidang

Mutasi dan Promosi pada BKD Provinsi Maluku mempunyai tugas menyelenggarakan proses mutasi dan promosi, mengkoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi, memverifikasi dokumen mutasi dan promosi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Mutasi, Pensiun dan Pemberhentian, mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian, serta

menyusun data, informasi dan dokumentasi sesuai peraturan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kepangkatan dan Kenaikan Gaji Berkala, mempunyai tugas menyusun dan mengelola proses Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala pegawai ASN sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Karier dan Promosi, mempunyai tugas menyusun rencana pengembangan karir dan promosi ASN, mengelola proses pengembangan karir dan promosi ASN serta menyusun pedoman pola karir dan DUK sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

2.1.1.5 Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas merumuskan kebijakan penilaian kinerja aparatur dan penghargaan, mengkoordinasikan kegiatan penilaian kinerja aparatur, usulan pemberian penghargaan, pembinaan disiplin dan kedudukan hukum sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola proses penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Disiplin dan Kedudukan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan disiplin dan kedudukan hukum pegawai ASN sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana pemberian penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta memproses usulan pemberian

penghargaan dan kesejahteraan pegawai ASN sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Formasi dan Pengadaan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Data dan Informasi Kepegawaian; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara.
- d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Mutasi, Pensiun dan Pemberhentian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kepangkatan dan Kenaikan Gaji Berkala; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Karier dan Promosi.
- e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Disiplin dan Kedudukan Hukum; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah.

1.2.2 Aspek Sumber Daya

BKD Provinsi Maluku didukung oleh 42 personil yang terbagi berdasarkan lokasi kerja seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini. Jumlah tersebut dialokasikan untuk memberikan layanan kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Maluku yang berjumlah 10.274 pegawai pada kondisi Desember 2022.

Gambar 1.2

JUMLAH ASN BKD BERDASARKAN JABATAN

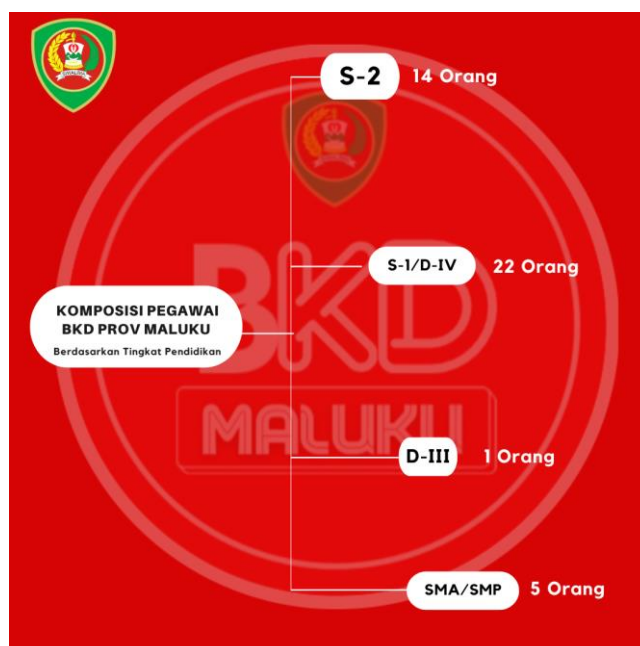


Sumber : SIMPEG 2022

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKD Provinsi Maluku didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan Strata II (S2) sebanyak 14 pegawai, Sarjana Strata I (S-1) dan Diploma IV (D-IV) dari berbagai jurusan sebanyak 22 pegawai, D.III sebanyak 1 pegawai dan SMA sebanyak 5 Pegawai. Kondisi tersebut terlihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.3

KOMPOSISI ASN BKD BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Sumber : SIMPEG 2022

1.3. Isu Strategis BKD Provinsi Maluku Tahun 2022

Dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran didasarkan kepada isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam manajemen kepegawaian BKD Provinsi Maluku, sehingga visi, misi, program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKD Provinsi Maluku diantaranya adalah :

1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Belum tersedianya Anjab dan ABK pada semua OPD
3. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa OPD
4. Masih adanya beberapa layanan kepegawaian yang tidak tepat waktu
5. Belum akuratnya seluruh data pegawai
6. Kondisi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pencapaian kinerja BKD

1.4. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut .:

- **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi BKD Provinsi Maluku
- 1.3 Isu strategis BKD Provinsi Maluku Tahun 2022
- 1.4 Sistematika Penulisan

- **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis dan target Tahun 2022
- 2.2 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022

- **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022
- 3.2 Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022

- **BAB IV : PENUTUP**

- 4.1 Tinjauan Umum
- 4.2 Masalah Yang Dihadapi
- 4.3 Saran dan Tindak Lanjut

- **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Langkah yang sangat penting dalam analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal perlu memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Selanjutnya, renstra beserta rencana dan capaian target kinerja BKD Provinsi Maluku Tahun 2022 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

2.1 Perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawah dan berkarya agar konsisten, antisipatif dan produktif.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku berpedoman pada Visi Gubernur Maluku yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 adalah:

“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”

Pencapaian visi dimaksud memerlukan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang konsisten pada tujuan ke masa yang akan datang.

b. Misi

Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Provinsi mencanangkan Misi yang termuat Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Murah dan Terjangkau;
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;
4. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau;
5. Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budayadan Pariwisata; dan
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi.

Terkait dengan Visi dan Misi Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 BKD Provinsi Maluku dalam penyusunan Rencana Strategis berdasarkan Misi ke-1 ***“ Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani ”***

c. Tujuan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku mempunyai tujuan :

- Mewujudkan Layanan Kepegawaian yang Profesional

d. Sasaran

- Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian kepada ASN

2.1.1 Rencana Strategis Dan Target Tahun 2022

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku merupakan dokumen yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni dari Tahun 2019 – 2024 dan memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dengan Keputusan Kepala BKD Provinsi Maluku nomor 800/475/X/BKD/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Asistensi Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 Tahun Anggaran 2019.

Renstra BKD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 merupakan salah satu pendukung RPJMD Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, karena BKD memiliki tupoksi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan **Misi 1 RPJMD Provinsi Maluku yaitu Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani.**

Berdasarkan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, Visi Pemerintah Provinsi Maluku adalah “**Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan**”.

Adapun keterkaitan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Maluku dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra BKD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



2.1.2 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Adapun target Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

TABEL 2.1
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Kepada ASN	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya Administrasi Perkantoran• Kelancaran Tugas-Tugas Perkantoran• Peningkatan akuntabilitas laporan• Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian• Jumlah ASN yang Mendapatkan Tugas Belajar dan Ijin Belajar• Simpeg Online yang Terintegrasi	Persentase Persentase Dokumen Persentase PNS Kab/Kota	100 100 1 84 7 11

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 dalam mendukung Visi dan Misi yang terdapat pada Renstra sesuai dengan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran: Meningkatkan Kualitas Layanan Kepegawaian kepada ASN.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah SKPD
 - a. Pemanfaatan Barang Milik daerah SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan

II. Program Kepegawaian Daerah

- 1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
 - a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - d. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - f. Pengelolaan Data Kepegawaian
- 2) Mutasi dan Promosi ASN;
 - a. Pengelolaan Mutasi ASN
 - b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c. Pengelolaan Promosi ASN
- 3) Pengembangan Kompetensi ASN;
 - a. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Asn
 - b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - c. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai

- c. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
- d. Pembinaan Disiplin ASN
- e. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- f. Evaluasi Disiplin ASN

2.2 Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Maluku untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah sesuai Perjanjian Kinerja diatas, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku telah melaksanakan 2 program, 12 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp. 14.439.967.478,- (Empat Belas Milyar Empat Ratus Empat Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala BKD Provinsi Maluku dengan Gubernur Maluku Tahun 2022, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 dan Program Kegiatan Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 dapat dilihat pada Lampiran 2.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penataan organisasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah didasarkan pada visi, misi, dan sasaran strategis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan kepada terbangunnya postur organisasi

yang bertanggung jawab dan terbuka. Kinerja pemerintah dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan seringkali menjadi sorotan publik. Masyarakat mulai menanyakan akan nilai yang mereka terima terutama sejak ditetapkan kebijakan pemerintah tentang reformasi birokrasi. Masyarakat menyoroti banyaknya jumlah anggaran yang terserap untuk pemenuhan belanja aparatur namun pelayanan yang diterima belum sesuai dengan harapan.

Banyaknya temuan penyalahgunaan anggaran di lingkungan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif mengindikasikan lemahnya sistem akuntabilitas, pengawasan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pengukuran akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masih sulit untuk dilakukan secara obyektif yang disebabkan belum optimalnya sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat kinerja suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kesulitan lainnya adalah pengukuran tingkat kinerja suatu instansi pemerintah hanya ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran bukan kepada hasil (*output*) maupun manfaat (*outcomes*) dari program dan kegiatan. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk dilakukan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah melalui analisis kinerja dengan cara pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja suatu organisasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkeyakinan melalui sistem pertanggungjawaban kinerja (*performance accountability system*) akan dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Tahun 2022. Selain itu melalui sistem pertanggungjawaban kinerja ini pula seluruh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) akan dapat mengetahui capaian kinerja dan realisasi keuangan sehingga dapat memberikan penilaian sejauh mana penyimpangan maupun kemajuan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan suatu program dan kegiatan.

Untuk mengetahui informasi kinerja dan keuangan, maka secara sistematis pertanggungjawaban (*accountability*) kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program/kegiatan secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik (*feedback*) merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus guna mencapai keberhasilan di masa mendatang. Hal ini artinya bahwa melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja suatu organisasi dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja, maka program/kegiatan instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi serta dapat dibandingkan dengan instansi lain yang sejenis, sehingga penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan secara lebih objektif.

Sebagaimana diketahui bahwa pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Bersandar pada penegasan dimaksud, maka diketahui bahwa komponen strategis pengukuran kinerja adalah pencapaian rencana tingkat capaian (target) yang merupakan hasil pembandingan antara realisasi dengan rencana tingkat capaian (target) kinerja kegiatan maupun sasaran dalam kurun waktu tahun berjalan.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>90-100	Sangat Memuaskan
2	>80-90	Memuaskan
3	>70-80	Sangat Baik
4	>60-70	Baik
5	>50-60	Cukup
6	>30-50	Kurang
7	0-30	Sangat Kurang

3.1.2 Analisis dan Evaluasi Kinerja

1. Analisis Capaian Kinerja

Adapun analisis capaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut

SASARAN	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian kepada ASN
----------------	-------------------------------------------------------------

Sasaran ini merupakan penjabaran dari Tujuan Mewujudnya Layanan Kepegawaian yang Profesional. Hasil Pengukuran Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Kepegawaian kepada ASN dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Kepegawaian kepada ASN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedia Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%
Kelancaran Tugas - Tugas Perkantoran	100%	100%	100%
Peningkatan Akuntabilitas Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Persentase ASN yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	84%	95.48%	100%
Jumlah ASN yang Mendapatkan Tugas Belajar dan Ijin Belajar	7 PNS	19 PNS	100%
Simpeg Online yang Terintegrasi	11 Kab/Kota	9 Kab/Kota	90%
Rata-rata Capaian Kinerja			100

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran
Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian kepada ASN				
1.1	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%
1.2	Kelancaran Tugas - Tugas Perkantoran	100%	100%	100%
1.3	Peningkatan Akuntabilitas Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.4	Persentase ASN yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	84%	95.48%	113%
1.5	Jumlah ASN yang Mendapatkan Tugas Belajar dan Ijin Belajar	7 PNS	19 PNS	271%
1.6	Simpeg Online yang Terintegrasi	11 Kab/Kota	9 Kab/Kota	90%

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran
Tahun 2021 Dan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2021		2022		Capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian kepada ASN						
1.1	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Kelancaran Tugas - Tugas Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Peningkatan Akuntabilitas Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.4	Persentase ASN yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	83%	95.48%	83%	95%	96%
1.5	Jumlah ASN yang Mendapatkan Tugas Belajar	10 PNS	10 PNS	7 PNS	19 PNS	100%

	dan Ijin Belajar					
1.6	Simpeg Online yang Terintegrasi	11 Kab/Kota	9 Kab/Kota	11 Kab/Kota	9 Kab/Kota	90%

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran
Tahun 2021, Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	2021		2022		Capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian kepada ASN						
1.1	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Kelancaran Tugas - Tugas Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Peningkatan Akuntabilitas Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.4	Persentase ASN yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	83%	95.48%	83%	95%	96%
1.5	Jumlah ASN yang Mendapatkan Tugas Belajar dan Ijin Belajar	10 PNS	10 PNS	7 PNS	19 PNS	100%
1.6	Simpeg Online yang Terintegrasi	11 Kab/Kota	9 Kab/Kota	11 Kab/Kota	9 Kab/Kota	90%
NO	Indikator Kinerja	2024				Target Capaian
		Target Capaian				
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian kepada ASN						
1.1	Indeks Sistem Merit	270 Poin				

Terjadi Perubahan sesuai dengan Renstra Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku yang lebih berfokus pada peningkatan Indeks Sistem Merit.

1.1 Tersedianya Administrasi Perkantoran

Program/Kegiatan yang termuat dalam indikator ini telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelayanan yang ada pada BKD Provinsi Maluku antara lain Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat serta didukung dengan Sumber Daya Aparatur dan Anggaran yang ada pada BKD Provinsi Maluku sehingga hasil yang didapat dari pencapaian program sebesar **100%**.

- Realisasi tahun 2022 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2021 sebesar 100%.
- Realisasi tahun 2022 sebesar 100% sama dengan target jangka menengah (tahun 2024) sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian tahun 2022 sudah baik dan diharapkan untuk dapat dipertahankan.

1.2 Kelancaran Tugas - Tugas Perkantoran

Program/Kegiatan yang termuat dalam indikator ini telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelayanan yang ada pada BKD Provinsi Maluku antara lain Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan serta didukung dengan Sumber Daya Aparatur dan anggaran yang ada pada BKD Provinsi Maluku sehingga hasil yang didapat dari pencapaian program sebesar **100%**.

- Realisasi tahun 2022 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2021 sebesar 100%
- Realisasi tahun 2022 sebesar 100% sama dengan target jangka menengah (tahun 2024) sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa

tingkat pencapaian tahun 2022 sudah baik dan diharapkan untuk dapat dipertahankan

1.3 Peningkatan Akuntabilitas Laporan

Program/Kegiatan yang termuat dalam Indikator Kinerja Peningkatan Akuntabilitas Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi dengan tersusun 1 Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKD Provinsi Maluku

- Realisasi tahun 2022 sebanyak 1 Dokumen sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 0% atau tidak dianggarkan.
- Realisasi tahun 2022 sebanyak 1 Dokumen dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2024) sebesar 1 Dokumen.

1.4 Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian

Jumlah ASN yang mendapatkan layanan kepegawaian 9653 ASN dari jumlah ASN Provinsi Maluku sebanyak 9653 ASN Persentase jumlah ASN yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian sebanyak **100%**. Keberhasilan pencapaian tersebut didukung dengan Sumber Daya Aparatur dan Anggaran yang ada pada BKD Provinsi Maluku. ASN yang mendapatkan pelayanan antara lain :

1. Seleksi CPNS/PPPK sebanyak 2.202 PNS
 2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebanyak 376 ASN
 3. Pengelolaan Mutasi sebanyak 225 SK
 4. Pengelolaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 2620 SK
 5. Pengelolaan Promosi ASN sebanyak 136 ASN
 6. Pengelolaan Adminitrasi Diklat dan Sertifikasi ASN sebanyak 182 ASN
 7. Pelayanan SK Tugas Belajar dan Ijin Belajar sebanyak 33 ASN
 8. Fasilitasi dan Pelayanan Jabatan Fungsional sebanyak 156 ASN
 9. Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai sebanyak 217 ASN
 10. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai sebanyak 201 ASN
 11. Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN sebanyak 51 ASN
- Realisasi tahun 2022 sebesar 97,11% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 72.23% orang
 - Realisasi tahun 2022 sebesar 97,11% dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2024) sebesar 86%.

1.5 Jumlah ASN yang mendapatkan Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Jumlah ASN yang mendapatkan tugas belajar dan ijin belajar pada tahun 2022 sebanyak 19 PNS dengan rincian Beasiswa tugas belajar Profesi/Spesialis sebanyak 7 PNS, Beasiswa Tugas Belajar S2 sebanyak 10 PNS dan Beasiswa Tugas Belajar S1 sebanyak 2 PNS. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 5 PNS, maka pencapaian dari kinerja ini sebesar **271%**, dikarenakan pada Tahun 2022 BKD Provinsi Maluku hanya menyelesaikan administrasi Beasiswa Tugas Belajar bagi PNS sudah melaksanakan pendidikan dari Tahun 2021 dan memfasilitasi pembiayaan bagi Beasiswa Tugas Belajar S2 dan tidak ada tambahan Beasiswa Tugas Belajar yang baru.

- Realisasi tahun 2022 terdapat 1 PNS yang mendapat Beasiswa Tugas Belajar dan Bantuan Pendidikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021-2022 sebanyak 18 PNS
- Realisasi tahun 2022 sebanyak 19 ASN dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2024) sebanyak 66 ASN. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk mengembangkan pengetahuan dan kapasitas PNS melalui Pemberian Tugas Belajar dan Bantuan pendidikan.

1.6 Simpeg online Terintegrasi

Simpeg online yang terintegrasi selama tahun 2022 yang direncanakan sebanyak 11 Kab/Kota namun yang terealisasi sebanyak 9 Kab/kota atau **90%**, Pencapaian belum mencapai target karena 1 Kabupaten Infrastruktur Jaringan yang belum memadai dan 1 Kabupaten sudah ada sistem sendiri yang tidak dapat terintegrasi dengan sistem lain. Diharapkan pada Tahun 2023 Infrastruktur jaringan dapat diperbaiki sehingga dapat terintegrasi dan menyelesaikan proses integrasi 1 Kabupaten.

- Realisasi tahun 2022 sebanyak 9 Kab/Kota atau terjadi penambahan 1 Kabupaten yang Simpeg onlinenya telah terintegrasi dengan Provinsi Maluku dan diharapkan pada tahun 2023 11 Kabupaten/Kota Simpeg Online telah terintegrasi dengan Provinsi Maluku, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 tidak ada realisasi tambahan dari tahun 2019 yaitu sebanyak 7 Kab/Kota

- Realisasi tahun 2022 sebanyak 9 Kab/Kota yaitu Kota Ambon, Kota Tual, Kab. Maluku Tengah, Kab. SBB, Kab. SBT, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Buru, Kab. Bursel, Kab. Malra.

Capaian yang telah diraih pada Tahun 2022 menjadi patokan bagi BKD Provinsi Maluku untuk terus melakukan perbaikan serta dapat meraih target-target yang belum dipenuhi dan akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota dalam hal ini BKPSDM agar sejalan mencapai target-target dan tujuan bersama

Capaian Kinerja Program/Kegiatan yang menunjang pelaksanaan Pelayanan BKD Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program/Kegiatan penunjang Pelayanan
BKD Provinsi Maluku Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	
				(K)	(%)
1	2	3	4	5	6
*	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100.00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	100.00
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	4	100.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	1	100.00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Dokumen	18	18	100.00
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				

8	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Orang	98	98	100
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PNS	5014	4978	99.29
10	Monitoring, Evaluasi dan Kinerja Pegawai	Kab/Kota	11	10	91.66
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	100.00
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100.00
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	100.00
14	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kali	561	561	100.00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	2	2	100.00
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
16	Pengadaan Mebel	Unit	16	16	100.00
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	24	24	100.00
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kali	90	90	100.00
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	26.83
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kali	36	36	100.00
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	10	10	100.00
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	2	100.00
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
IX	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				

23	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	1	100.00
24	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Orang	6000	5666	94.44
25	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	SK	150	150	100.00
26	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kegiatan	2	2	100.00
27	Pengelolaan Data Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian	Aplikasi	2	2	100.00
28	Pengelolaan Data Kepegawaian	PNS	9042	9042	100.00
X	Mutasi dan Promosi ASN				
29	Pengelolaan Mutasi ASN	SK	400	381	95.11
30	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PNS	2000	2620	131.00
31	Pengelolaan Promosi ASN	PNS	100	100	100.00
XI	Pengembangan Kompetensi ASN				
32	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PNS	7	19	271.83
33	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	PNS	100	100	100.00
34	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kali	1	1	100.00
XII	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
35	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	1	1	100.00
36	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	PNS	650	217	33.38
37	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	PNS	150	201	134.00
38	Pembinaan Disiplin ASN	Laporan	1	1	100.00
39	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	PNS	30	30	100.00
40	Evaluasi Disiplin ASN	OPD	44	48	100.00

3.2 Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022

Realisasi Anggaran BKD Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran BKD Provinsi Maluku Tahun 2022
31 Desember 2022

No	Uraian	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
*	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	14.439.967.478	13.780.217.364	95.43
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.604.068.840	8.263.940.434	96.05
I	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	52.534.049	52.534.049	100.00
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.267.568	17.267.568	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	14,999,750	14,999,750	100.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.266.731	20.266.731	100.00
II	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	5.047.220.584	4.802.604.967	95.15
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.952.762.364	4.708.146.747	95.06
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	55,246,520	55,246,520	100.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	19.998.630	19.998.630	100.00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.213.070	19.213.070	100.00
III	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	19.992.648	19.992.648	100.00
8	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	19.992.648	19.992.648	100.00
IV	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	1.773.917.340	1.733.257.979	97.71
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.403.920.000	1.393.892.000	99.29
10	Monitoring, Evaluasi dan Kinerja Pegawai	360.247.340	330.215.979	91.66
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.750.000	9.150.000	93.85

V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	642.010.299	631.637.399	98.38
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,122,900	6,122,900	100.00
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	267.294.359	267.294.359	100.00
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.282.900	55.282.900	100.00
15	Fasilitas Kunjungan Tamu	96.051.000	96.051.000	100.00
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.259.140	206.886.240	95.23
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	437.060.000	434.190.280	99.34
17	Pengadaan Mebel	319.360.000	316.865.280	99.22
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.700.00	117.325.000	99.68
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.652.320	458.041.512	91.67
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.500.000	34.500.000	100.00
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.700.000	12.259.410	26.83
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.360.000	24.360.000	100.00
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.092.320	386.922.102	97.93
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.681.600	131.681.600	100.00
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	131.681.600	131.681.600	100.00
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.835.898.638	5.516.276.930	94.52
IX	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.745.179.230	2.580.446.646	94.00
24	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	209.910.917	200.052.537	95.30
25	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	389.207.431	367.585.159	94.44
26	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	79.999.543	74.326.603	92.91

27	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	415.161.800	375.543.910	90.46
28	Pengelolaan Data Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian	1.483.572.571	1.397.259.992	94.18
29	Pengelolaan Data Kepegawaian	167.326.968	165.678.445	99.01
X	Mutasi dan Promosi ASN	1.855.613.600	1.811.500.408	97.62
30	Pengelolaan Mutasi ASN	282.926.530	269.096.910	95.11
31	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	192.512.970	169.258.290	87.92
32	Pengelolaan Promosi ASN	1.380.174.100	1.373.145.208	99.49
XI	Pengembangan Kompetensi ASN	492.701.950	425.529.257	86.37
33	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	366.208.850	313.120.337	85.50
34	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	55.538.500	51.641.700	92.98
35	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	70.954.600	60.767.220	85.64
XII	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	742.403.858	698.800.919	94.13
36	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	202.156.100	195.764.680	96.84
37	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	158.140.000	144.370.850	91.29
38	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	74.025.123	67.115.393	90.67
39	Pembinaan Disiplin ASN	69.177.081	64.530.081	93.28
40	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	168.402.530	161.074.121	95.65
41	Evaluasi Disiplin ASN	70.503.024	65.945.794	93.54
Total		14.439.967.478	13.780.217.364	95.43

(Sumber: Laporan Penyerapan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022)

Berdasarkan Tabel 3.3 tersebut, maka analisis terhadap capaian keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 secara komprehensif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Biaya dalam rangka penyelenggaraan program/kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBD dan APBDP Provinsi Maluku. Target APBD dan APBDP untuk kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sebesar **Rp. 14.439.967.478,-** (Empat Belas Milyar Empat Ratus Empat Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
2. Realisasi APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 sampai pada batas pertanggungjawaban anggaran yakni per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 13.780.257.364,-** (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). Jika dilakukan perhitungan capaian kinerja berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target diperoleh presentase pencapaian rencana (target) sebesar **95.43%**.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, terdapat **siswa dana** sebesar **Rp. 659.750.114,-** (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Empat Rupiah).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Demikian Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 telah dijelaskan secara sistematis pada Bab III. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2022 diuraikan sesuai Tata Kelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Capaian kinerja merupakan upaya untuk penggunaan biaya secara efisien dan pelaksanaan kegiatan secara efektif sesuai aturan yang berlaku sebagai wujud ketaatan dalam memanfaatkan sumber daya secara akuntabel guna pencapaian hasil yang optimal sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dalam keikutsertaan memberi kontribusi bagi kelanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat

Maluku. Total anggaran sesuai APBD Pergeseran, Badan kepegawaian Daerah Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 14.439.967.478,-** (Empat Belas Milyar Empat Ratus Empat Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi Anggaran 2022 sebesar **Rp. 13.780.57.364,-** (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau sebesar **95.43%**.

Jika dilakukan perhitungan Sisa anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 659.750.114,-** (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Empat Rupiah) atau sebesar **4.57%**.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelanjutan kegiatan yang telah menjadi agenda rutin tetap dilaksanakan pada tahun 2022, termasuk dengan meningkatkan capaian target kinerja dan meminimalisir kekurangan dan kendala kegiatan yang ada sekarang ini dengan meningkatkan koordinasi, konsultasi dan konsolidasi secara berjenjang dengan instansi baik secara vertikal maupun horizontal pada pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku pada tahun-tahun berikut serta tindak lanjut perubahan ketentuan PerUndang-Undangan khususnya di bidang Kepegawaian.

Adapun dari Hasil yang dicapai terdapat Outcome dan Output. Outcome yang dimaksud yaitu Tercapainya 1 Dokumen LKIP dan Outcomenya yaitu Tercapai Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.

4.2 Saran

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja tahun 2022, maka saran yang perlu menjadi perhatian oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku yaitu meningkatkan koordinasi dengan instansi Pembina Kepegawaian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara RI dan Kantor Regional IV BKN Makassar dalam rangka konsultasi dan konsolidasi terkait petunjuk teknis pelaksanaan program kegiatan maupun perubahan regulasi urusan kepegawaian.